

Protes Masyarakat Muslim Melayu-Patani sebagai Upaya Memperoleh Hak Otonomi, 1902-1948

Ahmad Anas Fajarul

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

anasfajarul99@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to analyze; how the social and political conditions of Malay-Patani Muslims in 1902? how the Malay-Patani Muslim protest movement in an effort to gain autonomy? and why the protest movement influenced the socio-political changes of Malay Muslims in Thailand? This research uses historical methods through the stages of heuristic, verification (source criticism), interpretation, and historiography. The results of this study show that 1) The defeat of Patani led by Tengku Abdul Kadir, made Patani and the surrounding Islamic areas have to submit to the Siamese kingdom so that they do not have autonomy both from politics, culture, language and religion; 2) There were protest movements aimed at fighting for the autonomy of Malay Muslims in Patani from 1910 to 1923, for example in 1910 and 1911 and the peak in 1921 to 1923 which was marked by the enactment of an education law aimed at eliminating Islamic educational institutions in Southern Thailand; 3) The issue of autonomy in Southern Thailand only reached a certain realm, and the Thai government basically issued these policies as a control over Malay Muslims so that they do not separate from Thailand. However, the mistake will be to understand from the aspirations conveyed by Malay Muslims that continue to give birth to protest movements until the future.

Keywords: Protest, Muslim, Malay, Patani, Autonomy

PENDAHULUAN

Munculnya konflik yang diselimuti sentimen agama akan berpotensi sulit untuk diselesaikan (*intractable conflict/unnegotiable conflict*). Apalagi jika konflik tersebut melibatkan unsur etnisitas sehingga konflik tersebut tidak hanya mengarah pada masalah keagamaan saja namun juga pada etnisitas (*ethnoreligious conflict*). Hal demikian menjadikan semakin rumitnya penyelesaian konflik dan bisa berakibat pada konflik yang berkepanjangan. (Raharjo, 2015) Di Kawasan Asia Tenggara banyak konflik yang melibatkan unsur etnisitas dan agama yang mengakibatkan konflik tersebut belum bisa hilang atau terselesaikan secara tuntas. Misalnya konflik di Myanmar antara etnis Rakhine yang beragama Budha dengan etnis Rohingya yang beragama Muslim, di Filipina antara etnis Moro yang beragama Muslim dengan pemerintah Pilipina, dan di Thailand antara etnis Thai yang beragama Budha dengan etnis Muslim Melayu di Patani.

Terkadang pemicu suatu konflik etno-religius berhubungan dengan adanya tekanan militer dari pemerintah, walaupun demikian pemicu utamanya ialah terkait perselisihan antar ideologi-ideologi mutlak, tidak adanya kompromi, dan tekanan nasionalisme negara melawan nasionalisme etnis. Dalam banyak kasus, pemerintah

di suatu negara dalam menghentikan konflik etno-religius sering memberi “label atau klaim” sebagai pemberontak/teroris dan separatisme daripada melakukan tindakan dialog dan konsiliasi terhadap etnis yang merasa dirugikan. Klaim-klaim sepihak seperti itu tentunya menimbulkan kerugian di kalangan etnis minoritas dan dapat mempersulit upaya mencari solusi substantif antar konflik etnis dan agama.(Idi, 2018)

Beberapa penyebab terjadinya konflik etno-religius, seperti kebijakan-kebijakan yang memunculkan dominasi satu pihak dalam penguasaan sumber daya sehingga timbul kesenjangan yang berujung pada konflik horinzontal. Kemudian, kesenjangan politik dan adanya integrasi yang berpihak pada satu etnis dan agama juga akan membawa pada kecemburuan sosial bagi etnis yang merasa dirugikan.(Adnan, 2020)

Ketegangan dan konflik yang berujung pada kekerasan memiliki banyak penyebab. Agama yang merupakan kepercayaan dari sistem agama yang merupakan kepercayaan dan budaya adalah salah satu faktor yang mungkin menyebabkan kekerasan. Penyebab menguatnya frekuensi konflik dan intensitas konflik bervariasi, misalnya sejauhmana pemerintah berusaha menerapkan kebijakan yang salah atau kebijakan asing yang nampaknya bertentangan dengan keyakinan agama dan praktik budaya masyarakat di provinsi Thailand Selatan. Kegagalan memahami isu agama dan aspek budaya masyarakat di Thailand Selatan dapat membahayakan hubungan antara mayoritas Budha dan minoritas Muslim di Thailand Selatan.(Narongraksakhet & Afandi Salleh, 2017)

Menariknya, konflik di Thailand Selatan (Patani Raya) pada umumnya bukanlah persoalan sikap anti Siam ataupun berkembangnya gerakan separatisme, melainkan karena adanya diskriminasi yang kompleks di masyarakat, meliputi kehidupan agama, sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Kenyataan tersebut membawa konflik yang terjadi di Thailand Selatan juga diselimuti sentimen agama yang begitu kuat. Kemudian, pemerintah Thailand dianggap tidak menginginkan setiap pintu-pintu penyebaran Islam di wilayah Patani Raya menjadi gerbong perkembangan agama Islam, seperti dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini akan melihat aspek-aspek historis yang mempengaruhi timbulnya protes Muslim Melayu terhadap Pemerintah Thailand. Protes dan perlawanan dari masyarakat Muslim Melayu Patani sendiri, disini dilihat sebagai bentuk perjuangan dalam upaya mendapatkan kembali hak otonomi. Karena

penelitian ini bersifat historis, maka penelitian ini akan mengkronologis peristiwa dari waktu ke waktu munculnya peristiwa dengan penjelasan diskriptif-analitis, yakni dari tahun 1902-1948. Selain itu penelitian ini akan melihat dari berbagai sudut pandang, yakni pemerintah Thailand dan Muslim-Melayu Patani.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi-agama, yang mana digunakan untuk melihat dan menganalisis faktor-faktor munculnya konflik beragama, munculnya gerakan protes masyarakat Muslim Melayu Patani, dan kondisi umat beragama di Thailand. Maka dari itu, untuk melihat fenomena konflik yang terjadi di masyarakat Muslim Melayu Patani, peneliti menggunakan teori konflik untuk dijadikan pisau analisis, sebagaimana dalam pandangan Louis Coser, seperti ditulis Ali Fauzi dkk, bahwa konflik adalah *“a struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in which the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals”*. (Aisyah, 2014). Kemudian, untuk menjelaskan hak otonomi sendiri perlunya ada konseptual yang melandasinya, sebagaimana apa yang dikatakan Soepomo, “otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat-sifat daerah lain”. Dengan demikian pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud *menguniformisir* seluruh daerah dengan satu model (Santoso, 2009).

Penelitian ini menggunakan metode historis. Metode historis memiliki beberapa tahapan, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis sumber), dan penulisan (historiografi). (Kuntowijoyo, 2018) Kemudian, dalam menggali sumber atau data dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik *library research* atau studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya. (Rahmadi, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial dan Politik Muslim Melayu Patani pada 1902

Masyarakat Muslim Melayu Patani merupakan komunitas Muslim yang berada di wilayah Thailand Selatan. Mereka sudah ada sejak masa Kerajaan Langkasuka kemudian berkembang pesat pada masa Kesultanan Patani Raya. Namun, Kekalahan Patani Raya atas Kerajaan Siam yang berada di wilayah Thailand Selatan membawa kemunduran Islam di wilayah Selatan. Hal itu dikarenakan banyaknya kebijakan yang dianggap merugikan dan berupaya menghilangkan identitas agama Islam dan bangsa Melayu di masyarakat Patani.

Setelah kekalahan Patani Raya, Siam membagi wilayah Patani Raya di Thailand Selatan menjadi tujuh bagian, meliputi (Patani, Saiburi/Teluba, Nongchik, Jalor/Yala, Jambu/Yaring, Rangae, Reman/Rahman). (Saifullah, 2010) Wilayah tujuh bagian tersebut sebelumnya masih memiliki hak otonomi secara kultural daerah melalui raja-raja yang memerintah dimasing-masing wilayah tersebut. Namun, pada masa pemerintahan Kerajaan Siam yang dipimpin oleh Chulangkron, pemerintah Siam menggunakan sistem *Thesaphiban* secara seragam di seluruh wilayah dan akibatnya melenyapkan otonomi keagamaan dan kebudayaan khas daerah masing-masing, termasuk Patani. Konsekuensi dari sistem ini adalah otonomi, kebudayaan khas, dan spesifikasi daerah dihapuskan, serta penguasa yang berasal dari pemimpin tradisional, juga dilenyapkan.

Pada tanggal 16 Desember tahun 1901, pemerintah membagi kekuasaan menjadi tiga: (a) kekuasaan seremonial (*Phya Muang*) yang dipegang raja-raja Patani, (b). Kekuasaan eksekutif (*Palat Muang*), yang dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi, dibantu (c). Pegawai undang-undang (*Yokraba*). Raja Patani (Tengku Abdul Kadir) menolak kebijakan baru tersebut, akibatnya ia ditangkap pada Februari 1902 dan dipenjarakan di Songkhla. (Saifullah, 2010) Dengan demikian setelah kekalahan Raja Patani pada tahun 1902 yakni Tengku Abdul Kadir,¹ wilayah Patani sudah tidak lagi dipimpin seorang Raja. Akan tetapi, ketujuh negeri tersebut dikelompokkan kembali menjadi kesatuan administratif yang disebut *Boriwen Chet Huamuang* atau “wilayah

¹ Kekalahan Patani menjadikan Raja Abdul Kadir ditangkap oleh kerajaan Siam. Namun, beberapa tahun Raja Tengku Abdul Kadir dibebaskan dan dia pergi mengasingkan diri di Kelantan, Malaysia.

tujuh provinsi” yang berada di bawah pengawasan komisioner wilayah yang berkedudukan di Patani.

Pada tanggal 20 Desember 1902, terjadi sebuah perjanjian perbatasan wilayah antara pemerintah Kolonial Inggris di semenanjung Malaya dan Kerajaan Siam, sehingga daerah bekas Patani Raya itu secara definitif mulai menjadi bagian integral dari Kerajaan Siam. Sejak saat itulah otonomi budaya orang-orang Melayu Muslim benar-benar terancam. Sebab, pemerintah kerajaan Siam mulai melakukan berbagai kebijakan integrasi yang bertujuan untuk mengantikan identitas kultural dan agama-agama Melayu Muslim dengan identitas kultural Thai yang bernafaskan Budhisme.

Sejak diberlakukannya kebijakan integrasi itu, sentimen etnis, kultural, dan agama di kalangan masyarakat Muslim Melayu semakin kuat. Rasa kebersamaan sebagai suatu kelompok etnis dengan budaya dan agama yang sama semakin mengakar. Mereka menolak atas persamaan sebagai Bangsa Thai, oleh sebab itu mereka mengekang untuk diatur oleh pemerintah Siam. Mereka ingin mengatur kebudayaan mereka sendiri, dengan kata lain mereka ingin merebut kembali otonomi sekurang-kurangnya dalam hal budaya, hukum, dan agama.(Hasbullah, 2003) Muslim Melayu Patani tidak ingin diintegrasikan ke dalam kerajaan Siam. Mereka tidak ingin kehilangan otonomi agama dan budaya telah menjadi identitas lama mereka. Jika negara Siam adalah perwujudan dari kosmologi Budha, maka bagi Muslim Melayu Patani tidak mau menjadi bagian dari pemerintahan tersebut.(I. Yusuf, 2007)

Para pemimpin keagamaan masyarakat Patani pada saat itu juga mengirim surat kepada pihak Inggris mengenai kemarahan mereka terhadap Siam, kemarahan tersebut terpusat pada dua hal. Pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh para komisioner terhadap kewenangan para raja, khususnya dalam hal pengumpulan pendapatan. Kedua, adanya campur tangan para pegawai Siam dalam urusan agama Islam. Mereka meminta kepada Inggris agar menengahi negara-negara bagian mereka dengan raja Siam serta mengisyaratkan bahwa jika tidak ada tanggapan, mereka akan melakukan kekerasan. Namun, tidak ada tindakan yang diambil Inggris atas permintaan tersebut.

Pada tahun 1906, wilayah tujuh negara bagian di Siam Selatan secara administratif digabungkan menjadi sebuah kesatuan baru yang disebut “*Monthon Pattani*” atau “Lingkaran Patani”. Dari 1906 dan seterusnya, kesultanan Patani dengan

cepat diintegrasikan ke dalam administrasi propinsi Siam. Provinsi Rahman disatukan dengan Yala, Yaring dengan Nonchick dan Patani. Setelah penggabungan ini, ketujuh negara bagian Siam Selatan dibagi menjadi empat provinsi, antara lain Patani, Yala, Saiburi (Teluban), dan Narathiwat. Setiap provinsi dibawah kewenangan komisi pengawas kerajaan Siam. Strategi ini dilakukan untuk memenuhi permintaan Inggris terkait keadilan bagi penduduk negara-negara bagian di wilayah Siam Selatan.(Abdullah & Siddique, 1989) Walaupun pada dasarnya pembagian itu untuk memudahkan mengontrol wilayah Patani dan sudah dihuni beberapa orang Thai, namun pada kenyataannya empat provinsi tetap menjalin ikatan sejarah sebagai bangsa Melayu dibandingkan dengan bangsa Thai disana.(Idi, 2018)

Kebijakan itu menjadikan muslim Melayu-Patani terintegrasi sebagai bagian dari bangsa Thai di Siam. Sebagai kelompok minoritas dengan identitas Islam, Muslim Patani dihadapkan pada kewajiban dan keterpaksaan mengikuti pola integrasi nasional yang dibuat pemerintah Kerajaan Siam agar menjadi kesatuan yang utuh sebagai bangsa Thai. Akibat konsekuensi dari kebijakan integrasi nasional dan integrasi politik administratif, menjadikan Muslim Melayu-Patani mulai memasuki babak baru dalam kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi di bawah kendali Kerajaan Siam. Kemudian, etnis Muslim Melayu-Patani di paksa mengikuti proses pembangunan kebangsaan Siam melalui penerapan segala kebijakan-kebijakan yang dikendalikan pemerintah (*state politik*) dan program-program asimilasi dan akomodasi pemerintah (*state program*) demi tujuan dan kepentingan nasional Siam.(Yuniarto, 2005)

Namun, kalau kita melihat dari sudut pandang kerajaan Siam sebagaimana yang dikatakan Keyes, bahwa nasionalisme Siam dianggap sebagai semangat kebangsaan yang didasarkan atas kesetiaan terhadap kerajaan Siam, bangsa Thai dan agama Budha. Kerajaan Siam memandang apa yang disebut *national heritage* dari Thai, yaitu satu agama (Budha), satu bahasa (bahasa Thai), dan mempunyai hubungan dengan kerajaan (*Chakkri monarkhi*). Nasionalisme Thai dan integrasi nasional dibuat untuk kepentingan menyatukan seluruh bangsa-bangsa yang berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Siam, termasuk etnis-etnis minoritas, seperti Muslim Melayu-Patani, Monks, dan Cina.(Yuniarto, 2005) Namun, berbeda sudut pandang kalau kita melihat dari sisi kelompok minoritas, misalnya kelompok Muslim Melayu Patani menganggap itu sebuah upaya menghilangkan identitas budaya bangsa Melayu.

Seperti apa yang dikatakan Joseph Chinyong Liow bahwa untuk memahami dinamika konflik yang terjadi pada Muslim-Melayu Patani dan Pemerintah Thailand, kita harus menghargai tidak hanya arti penting identitas Melayu, tetapi dorongan yang tiada henti di Bangkok untuk menciptakan dan menegaskan kewarganeraan Thailand yang khas.(Liow, 2006)

Gerakan Protes Muslim Melayu Patani dalam Upaya Mendapatkan Hak Otonomi

Kemarahan tetap berkobar di negara bagian-bagian yang dipicu oleh persoalan administrasi kerajaan dan sentimen agama. Identitas yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Melayu Patani memperlihatkan entitas kolektif orang-orang Melayu di empat provinsi bagian sebagai suatu manifestasi dari identitas etnis Melayu yang berada di Thailand.(Liow, 2006) Akibat ketidakpuasan etnis Muslim Melayu-Patani atas perlakuan diskriminasi pemerintah Kerajaan Siam memunculkan beberapa kali protes dan pemberontakan kecil yang terjadi pada tahun 1910 dan 1911.(Saifullah, 2010) Pada tahun 1910, terjadi protes dan pemberontakan di bawah pimpinan seorang mistikus Tua yang dijuluki To'tae. Akibat protes tersebut beberapa kantor-kantor pemerintah Siam di Thailand Selatan dibakar. Sedangkan pada tahun 1911, terjadi pemberontakan oleh Muslim Melayu-Patani akibat dari hasutan dari Haji Bula. Namun, pemberontakan tersebut dihentikan oleh pemerintah Siam.(Pitsuwan, 1989)

Setelah peristiwa tersebut, terjadi kevakuman gerakan protes dan pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Muslim Melayu-Patani kurang lebih selama 1 dekade, hal ini dikarena tidak adanya pemimpin yang dapat menggerakkan Muslim Melayu-Patani. Akan tetapi, muncul pemberontakan yang sporadis yang lebih luas pada tahun 1922 (dikenal sebagai pemberontakan Namsai), ketika penduduk Melayu di kampung-kampung provinsi Patani bersatu melawan kekuasaan Siam dan menolak membayar pajak dan sewa tanah.(Abdullah & Siddique, 1989) Dalam aksi perlawanan ini, para Muslim Melayu Patani bentrok dengan para pejabat Budhis yang ditempatkan di wilayah Siam bagian Selatan, banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak sebelum akhirnya dapat dihentikan oleh pemerintah Siam.(Hasbullah, 2003)

Etnis Muslim Melayu-Patani merasakan kerasahan dan tekanan karena akibat pengawasan yang begitu ketat dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari oleh

pemerintah Kerajaan Siam. Etnis Melayu-Patani kehilangan hak untuk menentukan nasib mereka atas kebudayaan sendiri sebagai umat Muslim. Bahasa, agama, dan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas identitas mereka telah di tempatkan di bawah kekuasaan dari sebuah negara atau pemerintahan yang didominasi oleh orang-orang yang meraka anggap kafir. Selain itu, hilangnya otoritas kekuasaan atau pemerintahan yang dipimpin langsung Muslim Melayu-Patani mempunyai makna yang khusus bagi orang Melayu Muslim, yang selama itu hidupnya berdasarkan syariat Islam. Oleh sebab itu, orang-orang Muslim Melayu-Patani berjuang mempertahankan kekuasaan politik mereka di wilayah Thailand Selatan.(Pitsuwan, 1989)

Kemudian, pada tahun 1921 muncul kebijakan UU Wajib Pendidikan Dasar, yang mewajibkan semua anak bersekolah di sekolah dasar selama empat tahun dan belajar bahasa Thai.(Melvin, 2007) Kebijakan ini mendorong asimilisasi komunitas Muslim Melayu di Patani yang difokuskan pada penghapusan pondok pesantren (sekolah orang-orang Muslim), yang secara tradisional mempunyai fungsi sentral dalam membangun budaya dan identitas Muslim Melayu. Kemunculan Kebijakan tersebut di respon oleh penduduk etnis Muslim Melayu-Patani melalui protes dan penolakan pada tahun 1923 serta pemberontakan semakin membesar yang meletus di Belukar Semak (Rakak).(Saifullah, 2010)

Pengaruh Gerakan Protes Terhadap Perubahan Sosial-Politik Muslim Melayu Patani di Thailand

Menanggapi atas pemberontakan yang dilakukan oleh Muslim Patani, pada bulan Juli 1923, pemerintah Kerajaan Siam yang berada di Bangkok terpaksa mencabut kembali terkait kebijakan “Pendidikan wajib”, “penetrasi birokrasi”, dan “campur tangan dalam urusan social-ekonomi di wilayah Patani Raya (Thailand Selatan)”. Raja Warchiravut memberikan konsensi-konsensi kepada kelompok elit keagamaan dan politik Patani Raya dan mengintrusikan Menteri Dalam Negerinya untuk mengikuti suatu perangkat garis-garis pedoman yang baru, diantaranya adalah:

1. Praktek-praktek atau peraturan-peraturan yang bagaimanapun – yang tampaknya bertentangan dengan Islam – harus dihentikan dengan segera. Setiap garis pedoman yang baru tidak boleh melanggar agama Islam.

2. Tingkat pajak yang dipungut dari orang-orang Melayu-Muslim di Patani tidak boleh lebih tinggi dari pajak yang dipungut di negeri-negeri Malaya (yang berada dibawah kekuasaan Inggris).
3. Pejabat-pejabat pemerintah yang akan ditugaskan di Patani harus jujur, sopan, dan tegas. Tidak boleh ada pejabat yang bertugas sedang menjalani hukuman karena telah melakukan kesalahan di daerah-daerah lain.(C. F. Yusuf, 2016)

Garis-garis pedoman baru tersebut mencerminkan dengan jelas sekali persepsi pemerintah Thailand mengenai masalah otonomi Patani Raya masa itu. Pemerintah Bangkok terpaksa memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada daerah-daerah Patani Raya dalam upaya mengintegrasikannya ke dalam sistem administrasi Thai. Dengan demikian, daerah-daerah Patani Raya memperoleh otonomi sampai tingkat tertentu, dan karakteristik kebudayaannya yang khas diakui secara resmi oleh pemerintah Thailand. Kebijakan ini menjadi awal suatu perjuangan yang panjang dan sangat berat untuk memperluas dan memperdalam otonomi bagi Melayu-Muslim di Thailand Selatan atas perbedaan-perbedaan etnik yang spesifik.

Walaupun demikian, kebijakan terkait garis-garis pedoman yang baru tidak memungkinkan bisa dijalankan sepenuhnya. Birokrasi Thailand yang didominasi oleh orang-orang Thai-Budhis yang dijiwai semangat “*sovinisme etnik Thai*”, tidak bisa diharapkan untuk melaksanakan dengan sukarela kebijakan-kebijakan negara untuk menghormati perbedaan-perbedaan regional dan melestarikan otonomi etnik. Mereka menganggap kebijakan yang dilakukan raja telah bertentangan dengan tujuan ideologis nasionalisme Thai.

Pemberian konsensi kepada etnis Melayu-Muslim Patani dapat dikatakan sebagai bentuk solusi dalam mengurangi tekanan dan tuntutan ke arah pemisahan total daerah-daerah yang dihuni Muslim khususnya Patani dari negara Thai. Pemerintah Thailand sebenarnya melihat ancaman yang nyata jikalau Patani dan daerah-daerah bawahannya di Thailand Selatan akan beralih ke tangan Inggris, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terkait asimilisasi kebudayaan dan konsolidasi kekuasaan harus dilaksanakan secara penuh kehati-hatian.

Apapun rencana-rencana yang dilakukan pemerintah Thailand dan wakil-wakilnya di daerah Patani Raya, sebenarnya kaum elit keagamaan dan politik Melayu menyadari bahwa kedudukan mereka hanyalah sampai tingkat tertentu. Namun,

kesediaan pemerintah Thailand memberikan dukungan materiil dan politik kepada orang-orang sesama Melayu di bawah kekuasaan Thai, menyadarkan para pejabat Thailand bahwa penindasan identitas etnik dan kebudayaan hanya akan memancing kekerasan. Sehingga mereka melakukan pendekatan secara damai dengan membina loyalitas politik, melegitimasi kekuasaan melalui partisipasi dan perwakilan usaha-usaha yang terus-menerus untuk mengembangkan perekonomian.(Pitsuwan, 1989)

Pada 1932, Kerajaan Siam menjadi sebuah kerajaan kontitusional/parlementer yang sebelumnya monarki absolut, sistem *Monthon Thesaphiban* berakhir dan semua lingkaran wilayah bagian (*Monthon*) dihapuskan. Setiap provinsi kemudian di bawah pengawasan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri di Bangkok.(Abdullah & Siddique, 1989) Keberhasilan perubahan sistem pemerintah itu merupakan atas desakan dan kudeta “Partai Rakyat” pada 24 Juni 1932, yang menginginkan suatu sistem baru sebagai bentuk proses evolusi politik di negara Thai. Peristiwa tersebut mengantarkan sebuah pemerintahan konstitusional dengan suatu doktrin revolusioner mengenai kedaulatan rakyat.(Abdullah & Siddique, 1989) Masyarakat Muslim Melayu pada saat itu juga ikut andil melakukan kudeta konstitusional pada tahun 1932, agar bisa mendapatkan hak duduk di parlemen nasional. Sejak saat itulah Muslim Melayu secara beransur-ansur merasa diikuti sertakan dalam pemilihan-pemilihan anggota parlemen.

Bagi orang-orang Muslim Melayu Patani, perubahan sistem pemerintahan itu merupakan kabar sangat mengembirakan. golongan elit agama dan politik Muslim Melayu menganggap bahwa system parlementar dapat memberikan angin segar untuk memperoleh konsensi-konsensi dari pemerintah Thailand untuk mempertahankan otonomi mereka dalam urusan keagamaan, kebahasaan, dan kebudayaan. Selain itu, golongan elit Muslim Melayu-Patani mempunyai alasan lain dalam menyambut kegembiraan atas evolusi demokratis negara Thai; *pertama*, pemimpin mereka yang kharismatik, bekas raja Patani atau Tengku Abdul Kadir telah meninggal dunia pada tahun 1933. *Kedua*, tidak ada organisasi politik yang efektif di kalangan Melayu-Muslim di Patani Raya saat itu.

Dengan menyadari bahwa pengintegrasian sepenuhnya ke dalam bangsa Thai mungkin akan mengakibatkan mereka kehilangan identitas khas mereka sebagai golongan Muslim Melayu dengan karakteristik-karakteristik sosial, kebudayaan dan

keagamaan. Mereka ingin mengulur-ulur waktu sampai posisi mereka benar-benar kuat, sebelum menuntut otonomi atau bahkan kemerdekaan, sesuai perkembangan situasi yang akan datang. Sementara itu, mereka akan tetap berpartisipasi dengan sistem politik yang ada. Untuk mencapai tujuan mereka dalam menuntut hak otonomi, mereka melimpahkan dan mempercayakannya kepada para mantan-mantan keturunan raja-raja mereka. (Melvin, 2007) Para pemimpin Muslim Melayu menunjukkan sopistikasi perpolitikan mereka dengan partisipasi yang terkendali dan beberapa kali memenangkan kursi di parlemen di daerah Thailand Selatan, (Pitsuwan, 1989) tercatat pada tahun 1933, Tui Bin Abdullah menang di Setun; 1937 dan 1938, Kumukda Abdul Putra menang di Patani; 1943 dan 1948, Che Abdullah Langputeh menang di daerah Setun. (Muzani, 1993)

Harapan para pemimpin Melayu Muslim untuk meraih apa yang mereka perjuangkan, yaitu otonomi dalam urusan keagamaan, kebudayaan, kebahasaan, dan hukum (lembaga peradilan), kandas ditengah jalan. Kenyataan itu terlihat bahwa kedudukan parlemen hanya sebatas sebagai lembaga penyalur keluhan-keluhan. Kekuasaannya hanya sebatas mengawasi dan pelaksanaan program-program di daerah, sangat kecil. Porsi kekuasaan masih lebih besar di tangan sejumlah kecil perwira militer dan elite birokrat yang berada pada lingkaran Kementerian Dalam Negeri, yang hanya menganggap parlemen hanya sekedar sebagai “bagian stempel karet”. Di satu sisi, Muslim Melayu terus dipaksa masuk dalam dinas militer, dan bahasa Thai, ajaran Budha, dan sejarah Thai terus diajarkan sebagai upaya asimilasi kebudayaan. Situasi semakin memburuk ketika pemerintah Thailand memberlakukan kebijakan program Ultra-Nasionalisme. (Hasbullah, 2003)

Ultra-nasionalisme mempunyai tujuan membentuk Negara Siam sejati dengan berdasarkan persamaan identitas, meliputi satu agama (agama Thai-Budha), satu bangsa (bangsa Thai), satu budaya (budaya Thai). Pada masa ini juga, Negara Siam berganti nama menjadi Thailand. Sebenarnya kebijakan Ultra-Nasionalisme sebagai bentuk landasan kesatuan yang didasarkan pada kebesaran Kerajaan Siam yang didominasi oleh etnis Thai yang beragama Budha. (Saifullah, 2010) Ultra-Nasionalisme yang menyokong kesatuan berbangsa yang didasarkan pada kebesaran kerajaan Siam dan dominasi etnis Thai yang beragama Budha. (Yuniarto, 2005) Bagi masyarakat Muslim Melayu-Patani, Program *Rathaniyom* tahun 1939 menjadi

masalah besar, karena mereka dilarang menggunakan identitas Melayu, seperti nama, pakaian, berbicara, dan menulis dengan bahasa Melayu, bahkan larangan belajar agama Islam. Puncaknya pada tahun 1944, dimana jabatan *qadhi* dihapuskan dan masalah berkaitan dengan perkawinan dan harta pusaka dimasukkan dalam undang-undang sipil, bukan syari'at.(Saifullah, 2010) Kenyataan itu jelas bahwa pihak pemerintah Thailand secara paksa telah menghancurkan kedaulatan dan kemandirian masyarakat Muslim Melayu Patani sebagai suatu entitas politik, budaya, bahasa, dan agama yang telah ada sebelumnya. (Yuniarto, 2005) Selain itu, masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan selalu mendapatkan pengawasan yang ketat dan kerap kali mendapatkan intimidasi dan teror. Di setiap jalanan mereka selalu diawasi dan dijaga oleh prajurit berseragam militer dengan senjata lengkap.

Kebijakan Ultra-nasionalisme diatas berdampak pada kemarahan besar dari etnis Muslim Melayu-Patani. Mereka mulai mengambil keputusan untuk menolak tunduk di bawah kekuasaan Thailand karena kebijakan tersebut dianggap akan menghilangkan sepenuhnya identitas yang khas dari mereka. Bersamaan dengan itu, gerakan nasionalisme Melayu sedang bangkit di seberang perbatasan, sehingga memicu tumbuhnya gerakan Pan-Melayu untuk mengobarkan semangat nasionalisme Melayu di negeri-negeri terjajah termasuk daerah-daerah Melayu di Thailand Selatan. Ketidakpuasan dan kebencian terhadap kebijakan *Thai Rathaniyom* mendorong golongan muda Muslim Melayu-Patani untuk menghidupkan kembali identitas Melayu dan meningkatkan kesadaran beragama Islam.(Pitsuwan, 1989) Muslim Melayu Thailand memandang integrasi nasional menyebabkan disintegrasi budaya mereka sendiri, karena menurut mereka, Budha Thailand dan Islam Melayu mempunyai dua orientasi kosmologis yang berbeda.(I. Yusuf, 2007) Pada Juli 1944, Pibhul Songkram jatuh dari kekuasaannya, ia digantikan oleh pemerintahan yang bersikap lebih ramah, dan kebijakan asimilasi yang dipaksakan. (Pitsuwan, 1989)

Menanggapi gejolak kemarahan dan protes yang semakin kuat dari etnis Muslim Melayu di Patani yang dipengaruhi semangat Pan-Melayu, pemerintah Thailand berupaya mencari simpati Muslim Melayu-Patani dengan memberlakukan “Undang-Undang Mengayomi Islam” atau “*Patronage of Islam Act*” pada tanggal 3 Mei 1945 yang diusulkan pelopor revolusi Siam 1932 bernama Pridi Banomyong dan seorang senator Muslim dari Bangkok yang bernama Cham Propoyong. Berdasarkan

undang-undang tersebut golongan ulama, majelis-majelis masjid, madrasah, dan *chularjjaamontri* (dewan ulama pemerintah), di integrasikan dalam adminitrasi Thailand.

Kaum ulama yang selama itu (masa Pibul Songkram tahun 1938-1944) hampir dihalau partisipasinya dalam proses politik nasional, sekarang dibujuk kembali ke dalam sistem pemerintahan yang baru. Akan tetapi, pemerintah Thailand menyembunyikan niat sebenarnya yang ingin mengontrol dan mengawasi kegiatan-kegiatan orang-orang Muslim, dengan jalan memberi bantuan dan perlindungan kepada eksponen-eksponen Islam terkemuka di Patani Raya.

Undang-undang itu, juga menggariskan bahwa akan dibentuk lembaga-lembaga baru sebagai penjemabatan antara umat Islam dengan pemerintah Thailand. Salah satu diantaranya adalah jabatan *Chularajamontri*, yang sama dengan jabatan *Syaikh al-Islam* di kesultanan Islam. Orang-orang yang memegang jabatan itu akan memberi nasehat kepada raja dan pemerintahannya mengenai cara-cara untuk membantu orang-orang Muslim dan kegiatan keagamaan mereka. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengintrusikan pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga pendidikan yang benar-benar bernafaskan Islam. Hal ini bertujuan untuk mewedahi bagi anak-anak Muslim yang orang tuanya enggan menyekolahkan di sekolah pemerintah. Namun, undang-undang ini dipandang oleh Muslim Melayu Patani sebagai bentuk penyamaan orang-orang Islam di Bangkok (orang Islam dari Bangsa Thai) yang identitasnya sudah terjalin erat dengan negara Thai. Penyebutan “*Thai-Muslim*” inilah yang nantinya menambah sumber konflik antara Muslim Melayu dengan pemerintah Thailand melalui birokrasinya.(Pitsuwan, 1989)

Dalam pandangan Surin Pitsuwan, ia berpendapat bahwa kebijakan “mengayomi Islam” hanya dijadikan sebagai alat untuk meredam gerakan-gerakan perlawanan etnis Muslim Melayu di Thailand Selatan. Kemudian, kebijakan pengintegrasian ulama juga bertujuan untuk memecah belah hubungan ulama dan bangsawan dan memberikan suatu *sence of belonging* golongan ulama atas negara Thai.(Pitsuwan, 1989) Bagi orang-orang Muslim Melayu di Thailand Selatan, periode antara tahun 1922 dan 1945 merupakan periode perjuangan untuk mempertahankan identitas kebudayaan dan politik mereka di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi di dalam negara Thai.

Tahun 1946 hingga 1948 menandai perubahan penting dalam hubungan antara Bangkok dan Muslim Melayu di Patani. Melihat kondisi masyarakat Muslim Melayu Patani yang semakin terpinggirkan karena upaya dilenyapkannya identitas Melayu membuat Haji Sulong bin Abdul Kadir mendirikan lembaga “*He’et al-Napadh al-Lahkanal Shariat* (Badan untuk mempertahankan Undang-Undang Syariat di Patani)”. Ia yang kembali dari Makkah sejak tahun 1930, langsung memperhatikan dan membenahi pada masalah pendidikan di Patani. Kemudian, ia juga mendirikan organisasi “Gerakan Rakyat Patani (GRP)”. Pada 3 April 1947, Haji Sulong yang didukung Masyarakat etnis Muslim Melayu di Thailand Selatan mengeluarkan resolusi 7 pasal sebagai tuntutan pemenuhan hak otonomi masyarakat Muslim Patani kepada pemerintah Thailand. Adapun isi resolusi tersebut sebagai berikut:

- a) Orang yang memerintah empat provinsi (Patani Raya) di Thailand Selatan (Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun) harus berasal dari penduduk lokal dan dipilih oleh rakyat dari empat provinsi tersebut.
- b) 80% pejabat pemerintah di Patani Raya harus Melayu Muslim.
- c) Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi disamping bahasa Thailand.
- d) Bahasa Melayu wajib diajarkan di sekolah dasar.
- e) Pelaksanaan Hukum Islam harus dibawah pengadilan Islam dengan hakim Muslim (qadhi) dan terpisah dari pengadilan perdata.
- f) Semua hasil pajak di daerah ini (Patani Raya) akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat di daerah ini.
- g) Dibentuknya Biro Urusan dan mempunyai wewenang penuh dalam menjalankan hukum syari’at kepada masyarakat Muslim.

Pemimpin Muslim Melayu memandang bahwa usulan Haji Sulong sebagai permintaan bagi entitas budaya dan wilayah yang otonom untuk melindungi karakternya yang unik, namun pemerintah memandangnya sebagai tuntutan untuk menjadi “negara yang merdeka”.(Muzani, 1993) Sehingga pemerintah Thailand menolak dengan keras resolusi yang digaungkan oleh Haji Sulong. Kemudian, pemerintah Thailand menangkap Haji Sulong pada 16 Januari 1948 dan dipenjarakan tahun 1949, namun dibebaskan pada tahun 1952.(Firmansah, 2019)

Kenyataan ini terlihat bahwa keinginan-keinginan untuk mendapat hak otonomi luas dalam menjalankan agama Islam, kebudayaan, dan bahasa bagi orang

Muslim Melayu Thailand Selatan tidak berjalan lama dan sesuai rencana. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Thailand dalam bentuk integrasi nasional sejatinya ingin melenyapkan identitas yang khas bagi etnis Muslim Melayu di Thailand Selatan. Hal itu lah yang terus memunculkan kekecewaan dan kebencian, yang kemudian terus melahirkan gerakan-gerakan protes dan pemberontakan di kalangan masyarakat Muslim Melayu.

KESIMPULAN

Kekalahan Patani yang dipimpin Tengku Abdul Kadir, menjadikan Patani dan daerah Islam disekitarnya harus tunduk pada kerajaan Siam. Sehingga mereka tidak memiliki kebebasan otonomi baik dari politik, kebudayaan, kebahasaan dan agama. Pemerintah kerajaan Siam mulai memberlakukan kebijakan integrasi Nasional yang bertujuan menyama ratakan bangsa, agama, dan bahasa di wilayah kekuasaannya. Sejak diberlakukannya kebijakan integrasi nasional Siam, masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan dihadapkan pada kondisi dilematis. Mereka merasa adanya kebijakan tersebut akan menghilangkan identitas khas mereka sebagai bangsa Muslim Melayu. Oleh sebab itu, mereka menolak disamakan dengan bangsa Thai yang beragama Budha.

Dari situlah lahir beberapa gerakan-gerakan protes yang bertujuan memperjuangkan hak otonomi Muslim Melayu di Patani. Dari tahun 1910-1923 muncul berbagai gerakan protes yang dilakukan Muslim Melayu di wilayah Selatan, misalnya pada tahun 1910 dan 1911 yang terjadi pembakaran gedung pemerintahan dan pemberontakan di daerah Thailand Selatan. Puncaknya pada tahun 1921-1923 yang ditandai dengan diberlakukannya undang-undang pendidikan yang bertujuan menghilangkan lembaga pendidikan Islam di Thailand Selatan. Mereka Muslim Melayu menolak dengan keras undang-undang tersebut karena dianggap akan melenyapkan identitas mereka sebagai Muslim Melayu.

Banyaknya gerakan protes yang dilakukan muslim Melayu di respon oleh pemerintah Thailand. Pertama mereka mengeluarkan kebijakan garis-garis pedoman baru dalam memerintah wilayah Thailand Selatan. Kedua, untuk mengantisipasi protes yang semakin dalam, pemerintah Thailand yang dipimpin Pridi Banomyong tahun 1945 mengeluarkan kebijakan “mengayomi Islam”. Namun, masalah otonomi di

Thailand Selatan hanya sampai pada ranah tertentu saja, dan pemerintah Thailand pada dasarnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut sebagai kontrol terhadap orang Muslim Melayu agar tidak memisahkan diri dari Thailand. Namun, kesalahan akan memahami dari aspirasi yang disampaikan Muslim Melayu inilah yang terus melahirkan gerakan-gerakan protes sampai masa depan.

REFERENSI

- Abdullah, T., & Siddique, S. (1989). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. LP3ES.
- Adnan, G. (2020). *SOSIOLOGI AGAMA: MEMAHAMI TEORI DAN PENDEKATAN*. Ar-raniry Press.
- Aisyah, S. (2014). KONFLIK SOSIAL DALAM HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2).
- Firmansah, A. (2019). The Dynamics of Ethnic Conflict in Southern Province Thailand. *Nation State Journal of International Studies*, 2(2), 210–221. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019v2i2.167>
- Hasbullah, M. (Ed.). (2003). *Asia Tenggara Kosentrasi Baru: Kebangkitan Islam*. Fokusmedia.
- Idi, A. (2018). *Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara*. LKiS.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Liow, J. C. (2006). *Muslim Resitence in Southern Thailand and Soutern Philippines: Religion, Ideology, and Politics*. Eas-Wets Center Washington.
- Melvin, Neil. J. (2007). Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency. *SIPRI Policy Paper*, 20, 1–48.
- Muzani, S. (Ed.). (1993). *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Pustaka LP3ES.
- Narongraksakhet, I., & Afandi Salleh, M. (2017). Conflicts of Religious Believes and Cultural Practices Among Muslims. *Proceedings of the International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*. International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016), Makassar, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.47>

- Pitsuwan, S. (1989). *Islam di Muangthai; Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani (Islam and Malay Nationalism; a case study of the Malay Muslim of Southern Thailand)*. LP3ES.
- Raharjo, S. N. I. (2015). PERAN IDENTITAS AGAMA DALAM KONFLIK DI RAKHINE MYANMAR TAHUN 2012–2013. | *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(1), 35–51.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metode Penelitian*. Antasari Press.
- Saifullah. (2010). *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Adminitrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Adminitrasi*, 6(4).
- Yuniarto, P. R. (2005). Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya Dan Akar Gerakan Separatisme, *Jurnal Masyarakat dan Budaya. Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 7(1), 89–119.
- Yusuf, C. F. (2016). *The Dynamics of Islam Philiphines, Myanmar, and Thailand*. Departement and Religious Affair of the Republic Indonesia.
- Yusuf, I. (2007). Faces of Islam in Southern Thailand. *East-West Center Washington Working Papers*, 7, 1–51.